



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI YALIMO TAHUN 2021**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGAR JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU, DAN PENGESAHAN ALAT
BUKTI)
(II)**

JAKARTA,

JUMAT, 4 JUNI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2021

PEMOHON

Lakius Peyon dan Nahum Mabel

TERMOHON

KPU Kabupaten Yalimo

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Jumat, 4 Juni 2021, Pukul 08.38 – 09.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

Lakius Peyon

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Jonathan Waeo Salisi
2. Pither Ponda Barany

C. Termohon:

1. Yehemia Walianggan (KPU Kabupaten Yalimo)
2. Okniel Kirakla (KPU Kabupaten Yalimo)
3. Hasyim Asy'ari (KPU RI)

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Johanis H. Maturbongs
2. Yusman Conoras

E. Bawaslu:

1. Amandus Situmorang (Bawaslu Kabupaten Yalimo)
2. Jamaluddin Lado Rua (Bawaslu Kabupaten Yalimo)

F. Pihak Terkait:

1. Erdi Dabi
2. John W. Wilil

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Budi Setyanto
2. Aan Sukirman
3. Supriyadi Adi
4. Dhimas Pradana

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.38 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, PHP Kabupaten Yalimo, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Tadi laporan dari Kepaniteraan sudah dicek kehadirannya, tiap Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu sudah hadir sehingga tidak perlu kita cek kembali, ya, sudah dinyatakan hadir. Agenda pada pagi hari ini adalah penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan nanti pengesahan alat bukti. Alat bukti yang akan disahkan supaya sekarang sudah diserahkan di Kepaniteraan.

Untuk Pemohon yang kalau ada bukti tambahan, silakan juga diserahkan sekarang, sudah?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Sudah, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, ya? Untuk Pihak Termohon, buktinya sudah diserahkan?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Sudah, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait buktinya sudah? Sudah.
Kemudian, Bawaslu buktinya sudah?

6. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Mohon izin, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

8. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bukti masih ada di hadapan kami. Kami serahkan ke Panitera?

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Diambil itu! Silakan, Petugas, bukti dari Bawaslu diambil untuk diverifikasi supaya nanti sebelum akhir persidangan sudah bisa disahkan.

10. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Mohon izin, Yang Mulia, sudah diserahkan tadi.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih.

Perlu saya ingatkan kembali, ini protokol kesehatan harus tetap kita tegakkan sehingga durasi persidangan ini harus kita hemat supaya kita tidak berlama-lama dalam ruangan tertutup yang ber-AC, meskipun Saudara-Saudara semua dan kita semua sudah diantigen dan negatif. Tapi untuk menjaga semuanya agar semuanya selalu sehat, maka durasi persidangan ini juga kita batasi, ya.

Saya persilakan Jawaban Termohon to the point, apa yang disampaikan? Karena Mahkamah, Majelis Panel, sudah menerima keterangan ... Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu sudah diterima secara tertulis nanti akan kita cermati kembali dan dalam persidangan ini disampaikan pokok-pokoknya saja, ya. Nanti disampaikan secara ringkas mulai dari kalau ada Eksepsi, Eksepsi. Kemudian Jawaban Termohon mengenai apa yang sudah didalilkan oleh Pemohon dan kemudian kalau dilanjutkan berikutnya Petitumnya. Begitu juga nanti untuk Pihak Terkait, ya? Supaya begitu keterangannya dan nanti Bawaslu yang terakhir. Keterangan dari Bawaslu juga nanti disampaikan secara ringkas.

Ya, saya persilakan, Termohon.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, terima kasih, Majelis Yang Mulia. Izinkanlah saya membacakan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 145 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Nomor Urut 2, atas nama Lakius Peyon, SST. Par. dan Nahum Mabel, S.H. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ym (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu sudah tidak usah dibacakan, dianggap dibacakan.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Kami masuk dalam eksepsi. Eksepsi, Poin a adalah kedudukan hukum atau legal standing.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Eksepsinya di legal ... kedudukan hukum, ya?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, kedudukan hukum.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus silakan, apa itu?

18. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Terkait antara selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi menyangkut ... eksepsinya menyangkut pemenuhan Pasal 158?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak terpenuhi?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Tidak terpenuhi, Majelis.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Saudara menunjukkan ada lebih berapa sih sebetulnya, selisihnya?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Selisihnya=4.724.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi berapa persen itu?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

5,2%, Majelis.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semestinya, harus berapa persen kalau meme ... supaya memenuhi Pasal 158?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Seharusnya di bawah itu, Majelis.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

2%?

30. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, 2%.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Menurut Pasal 158, 2%. Tapi ini, selisihnya 5,2%?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Eksepsi yang pertama mengenai legal standing.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Eksepsi (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian yang kedua? Eksepsinya?

36. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Eksepsi yang kedua mengenai obscure libel, Majelis.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, permohonannya kabur. Kenapa permohonannya kabur?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Kabur. Yang pertama itu soal terkait dengan nomor kartu tanda advokat dalam Surat Kuasa yang tidak dimasukkan.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Yang kedua soal bahwa Pokok Permohonan Pemohon, angka 1 sampai dengan angka 10 itu mempersoalkan soal syarat calon, Majelis.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Yang merupakan pelanggaran administrasi pemilu yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Menurut Termohon, apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu mestinya persoalan itu bukan persoalan yang diajukan ke Mahkamah?

46. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, benar, Majelis.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus yang lain?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Bahwa dalam ... bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon terkait dengan hasil terkait di Apalapsili, Majelis, Pemohon telah menerima dan tidak mempersoalkan hasilnya. Namun, pada Petitum halaman 27, Pemohon memasukkan perolehan suara pasangan calon pemungutan suara ulang di 29 kampung di Distrik Apalapsili sebagaimana tertera pada tabel angka 4.

Yang berikut. Bahwa pada ... dalam Petitum Permohonan Pemohon angka 5 dan 6 adalah Petitum yang tidak beralasan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Dalam Pokok Perkara, Majelis. Poin a adalah Pendahuluan, dimana bahwa Termohon menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 dan seterusnya tentang Tahapan ... dengan mengeluarkan

Surat Keputusan Nomor 115 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 02 tentang Tahapan Program, Jadwal, dan Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Suara Ulang (PSU) (bukti T-5).

Bahwa daftar jumlah pemilih DPT untuk 30 Distrik Apalapsili yang di-PSU-kan sebanyak 7.414 sedangkan jumlah daftar pemilih tetap untuk 76 TPS di Distrik Welarek sebanyak 21.810. Yang berik特 bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di Distrik Apalapsili itu dilaksanakan pada tanggal 7 Mei. Sedangkan ... sedangkan untuk Distrik Welarek dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 Mei 2021.

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang itu dilakukan serentak pada tanggal 5, Majelis, 5 Mei 2021 pada 30 Distrik Apalapsili, dan 76 TPS di Distrik Welarek. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang itu Distrik Apalapsili secara langsung disaksikan oleh Ibu Efi Novida Ginting Manik (Komisioner KPU RI), Bapak Rahmat Bagja (Komisioner KPU RI), Ibu Sandra Mambrasar (Komisioner KPU Provinsi Papua), Jamaluddin Lado Rua, Ronald Manoach (Komisioner Bawaslu Provinsi), Komisioner Bawaslu Kabupaten Yalimo. Sedangkan Bapak Fritz Edward Siregar (Komisioner Bawaslu RI), Bapak Adam Arisoi (Komisioner KPU Provinsi), dan Komisioner Bawaslu KPU Kabupaten Yalimo menyaksikan langsung pelaksanaan pemungutan suara ulang di Distrik Welarek.

Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di Distrik Apalapsili dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2021, sedangkan untuk Distrik Welarek dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten dilaksanakan selama 2 hari yaitu dari tanggal 10 Mei sampai 11 Mei 2021. Adapun hasil perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Erdi Dabi, S.Sos., dan John. W. Wilil. A.M.D.Par., memperoleh suara sebanyak 47.781 suara dan Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Lakius Peyon, S.S.T.Par., dan Nahum Mabel, S.H.,=43.057 suara (bukti T-6).

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih dengan Surat Keputusan Nomor 118/PL.02.7 dan seterusnya, dan Termohon telah menyerahkan kepada pasangan calon terpilih partai pengusung di DPR Kabupaten Yalimo, KPU RI, Bawaslu Kabupaten (bukti T-7).

Jawaban ... Poin b adalah jawaban terhadap Pokok Permohonan. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Termohon dalam Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu halaman 10 sampai halaman 20 (...)

52. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Halaman 10 sampai halaman ... bahwa sampai dengan halaman 17 untuk dalil Termohon akan menanggapi sebagai berikut.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Bahwa terkait ... bahwa Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo pada tanggal 6 September 2020, (bukti T-74). Bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan juga dokumen syarat pencalonan dan syarat calon kepada Termohon yang salah satunya dokumen syarat calon adalah surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Wamena, (Bukti T-8).

Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi, verifikasi faktual terhadap keseluruhan berkas pencalonan dan syarat calon yang diajukan oleh Pihak Terkait dengan berpedoman kepada Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 94 tentang Pedoman Teknis dan seterusnya. Bahwa Termohon telah menuangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, (Bukti T-9).

Bahwa Termohon menetapkan pasangan calon yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 004 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon dan juga telah melakukan penetapan terkait dengan nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo. Bahwa tidak ada laporan keberatan atau rekomendasi dari keputusan ... dan putusan yang diterima oleh termohon baik dari Pemohon maupun dari Bawaslu Kabupaten Yalimo terkait status penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait haruslah didiskualifikasi dari pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN JAP, tanggal 18 Februari 2021 yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan untuk terdakwa Saudara Erdi Dabi, S.Sos., (bukti T-10). Termohon menanggapi sebagai berikut. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu bukti p berapa? T berapa?

56. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Bukti T-10, Majelis.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti T-10, halaman berapa itu?

58. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Halaman 13, Majelis.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

13.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus?

62. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 18 Februari 2021 telah melewati tahapan jadwal dan program yang di dalamnya mengatur tentang syarat pencalonan dan syarat calon, verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon penetapan pasangan dan penetapan nomor urut tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500 dan seterusnya yang menjatuhkan pidana penjara 4 bulan tidak membatalkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Pasangan calon dikenakan sanksi pembatasan sebagai peserta pemilihan oleh KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota apabila poin b-nya, pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum hari pemungutan suara.

Bahwa dari ... bahwa maksud dari sebelum hari pemungutan suara berdasarkan pasal di atas adalah hari pemungutan suara serentak tanggal 9 Desember 2020 bukanlah dimaksudkan sebagai hari pemungutan suara ulang.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu langsung ke Poin 13.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Poin 13. Bahwa sampai dengan jawaban dibacakan, Termohon tidak pernah mendapatkan sebuah surat pun dari Pemohon atau rekomendasi putusan dari Bawaslu Kabupaten Yalimo mengharuskan Termohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, sehingga Termohon menolak semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Poin 14. Terkait dengan ... apa ... dalil Pemohon angka 11 sampai dengan 19, menanggapi ... kami menanggapi sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021, logistik telah berada di 5 titik wilayah yang ada di Distrik Welarek. Adapun 5 titik wilayah, yakni Welarek Induk, Mabualem (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu anu ... untuk yang jawaban terhadap dalil-dalil itu, silakan pokok-pokoknya saja, ya!

68. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, baik.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang tidak dibacakan dianggap dibacakan.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Baik. Bahwa terhadap (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, PSU berjalan lancar di Welarek?

72. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Berjalan lancar.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semua saksi tanda tangan?

74. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Untuk di kabupaten, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menandatangani, tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak menandatangani.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Untuk hasil di Apalapsili, Pemohon menerimanya. Tetapi untuk hasil di Welarek, Pemohon tidak menerimanya.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ada keberatan di situ dari Pasangan Nomor Urut 2?

78. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ada keberatan ... ada keberatan dari ... ada keberatan dari Pasangan Nomor Urut 2 pada saat pleno di Kabupaten Yalimo.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Keberatannya karena apa?

80. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Keberatannya karena hasil salinan dari Welarek ... Distrik Welarek C Hasil Salinan itu tidak sama dengan Model D.KWK yang dipaparkan oleh PPD Distrik Welarek, sehingga Pihak Terkait memprotesnya. Dan juga Bawaslu pada saat hal ini diprotes oleh Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Yalimo ketika ditanya oleh Termohon, mereka menolak hasil ini karena mereka belum menerima C Hasil Salinan Distrik Welarek yang bisa di ... disandingkan atau bisa dijadikan dasar untuk menganalisa hasil atau menjawab hasil dari distrik ... hasil dari distrik ... PPD Distrik Welarek. Sehingga, Pihak Terkait menyampaikan bahwa perlu ada pembukaan kotak untuk pasangan calon menghitung kembali ... KPU menghitung kembali suara yang ada di dalam kotak. Karena diduga oleh teman-teman dari Pihak Terkait bahwa hasil itu tidak sama dengan hasil yang sesungguhnya. Pada akhirnya, rekomendasi ... Bawaslu menanggapi dengan mengeluarkan rekomendasi ... mengeluarkan rekomendasi Nomor 01 tentang Rekomendasi Rekap Ulang di Distrik Welarek.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di tingkat kabupaten?

82. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Di tingkat kabupaten.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

84. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Lalu ada perdebatan antara Bawaslu ... PPD dengan Bawaslu kabupaten. Karena Bawaslu ... Bawaslu kabupaten menghendaki adanya rekap ulang, sementara PPD tidak menghendaki adanya rekap ulang. Sehingga, ada perdebatan yang sengit, lalu berujung pada ketidakkonsistenan PPD, dimana 2 anggota PPD secara nyata menyampaikan bahwa hasil distrik di PPD Distrik Welarek itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Rekapnya tidak berdasarkan C

Hologram, sementara duanya mempertahankan untuk tidak membuka kotak.

Berdasarkan hal itu, maka Termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Yalimo memberhentikan, mengambil alih kerja PPD untuk menghitung ulang terkait dengan rekomendasi rekap ulang oleh Bawaslu (...)

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Kabupaten Yalimo.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Dari hasil (...)

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, hasil ... hasil akhir dari (...)

90. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Hasil akhir (...)

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu suara yang benar menurut Termohon?

92. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Menurut Termohon, ada pada halaman 21, Majelis.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

94. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Tertera pada Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-88.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

T-88 itu? Baik.

96. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

98. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Mulai dari Ambaliki sampai (...)

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

100. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Pada Yahamer, Majelis.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

102. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Lalu tabel rekapitulasi suara untuk distrik ... D Hasil KWK-nya distrik per kampung, Majelis (...)

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

104. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Kami tampilkan juga mulai dari Kampung Ambaliki sampai dengan Yahamer itu untuk Bukti T-89, Majelis.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, hasil akhir suara yang benar menurut Termohon berapa?

106. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Suara yang benar menurut Termohon itu untuk Distrik Welarek, ya?

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

108. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Itu 42.336 ... 4.236.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk Pasangan Nomor 1 (...)

110. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan (...)

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasangan Nomor Urut 2?

112. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Pasangan Nomor Urut 2=17.464.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus kemudian, jumlah akhir total yang menggunakan hak pilih berapa suara sah itu?

114. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, yang menggunakan suara sah itu ada (...)

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

21.700?

116. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

21.700, Majelis.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

118. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ada suara yang (...)

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini untuk (...)

120. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Tidak sah ... Majelis, ada suara yang tidak sah.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak sah berapa suaranya?

122. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ada 110, Majelis.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

110.

124. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

110 itu terdapat di Kampung atau TPS Hindalimuhuk, TPS 1 sa ...
TPS 1, 1 suara tidak digunakan. Sinahal TPS 2 itu 100 suara tidak
digunakan. Lalu, di Tinmuhuk itu 9 suara tidak digunakan.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu yang Welarek, ya?

126. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Itu ... ya.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, akhirnya itu semua di Welarek bisa diselesaikan, diulang kembali penghitungan suaranya di rekapitulasi tingkat kabupaten?

128. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, Majelis.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dengan hasil yang sudah disebutkan ini tadi?

130. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Benar, Majelis.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang bagaimana yang di ap ... palad ... Apalapsili?

132. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Untuk yang Apalapsili tidak ada keberatan, Majelis.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada keberatan?

134. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, hasil akhir Apalapsili, Saudara bisa (...)

136. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Hasil akhir di Apalapsili itu Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara 6.769 suara.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

138. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Lakius Peyon dan Nahum Mabel=645 suara.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

645?

140. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Total jumlah suara sah?

142. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Total jumlah suara=7.414 suara, Majelis.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus sekarang, hasil akhir dari seluruh yang dijumlahkan dengan (...)

144. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Hasil akhir dari seluruh (...)

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang tidak dilakukan PSU berapa?

146. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Hasil akhir dari keseluruhannya untuk Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Erdi Dabi 47.000 ... 47.781. Dan Pasangan Nomor Urut 2 Lakius Peyon, S.S.T.Par dan Nahum Mabel=43.057 suara.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jumlah suara total itu, ya.

148. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

90?

150. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

90.300 ... 90.838 (...)

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

90.838?

152. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Petitumnya (...)

154. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Petitumnya (...)

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan disampaikan!

156. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- a. Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.
- b. Dalam pokok permohonan.
 1. Menolak permohonan Pemohon untuk selu ... seluruhnya.
 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 dan seterusnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tertanggal

11 Mei 2021, pukul 11.30 WIT yang memuat perolehan suara pasangan calon hasil pemungutan suara ulang pada 30 TPS di Distrik Apalapsili sebagai berikut.
Nomor Urut 1, nama pasangan calon erdidabi. S.Sos dan (...)

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak usah dibacakan nama pasangan calonnya.

158. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

6.769. Sedangkan Nomor Urut 2=645. Total jumlah suara 7.414.
Perolehan suara pasang calon hasil pemungutan suara ulang pada 76 TPS di Distrik Yularek sebagai berikut.

Pasangan Nomor Urut 1=4.236. Pasangan Nomor 2=17.464. Total jumlah suara=21.700. Hasil akhir perolehan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 dan seterusnya sebagai berikut.

Nomor Urut 1, jumlah perolehan suara=47.781. Nomor Urut 2=43.057 suara. Total jumlah suara=90.838 suara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Jakarta, 4 Juni 2021. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ditandatangani semua, ya?

160. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terima kasih untuk Termohon. Prof. Enny, ada yang perlu didalami? Silakan!

162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Untuk Termohon, ya. Ini yang dari dalilnya Pemohon, itu kan mengatakan C Hologramnya dibawa lari. Itu apakah memang betul kenyataannya dibawa lari?

163. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, Majelis Hakim Yang Terhormat, terkait dengan permohonan Pemohon yang mengatakan bahwa dibawa lari, dalam proses penghitungan terakhir di Kabupaten Yalimo di KPU keseluruhan dari 76 TPS itu semua ada, hanya tidak ada 4 TPS.

164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hanya 4 yang enggak ada, ya?

165. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Hanya 4 yang tidak ada. Namun, setelah sidang diskors pada hari pertama, Majelis (...)

166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu 4 itu yang diterangkan di halaman 26 itu?

167. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, Majelis.

168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang 4 itu kemudian dibawa oleh anggota PPS, ya?

169. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, dibawa oleh anggota PPS.

170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dibawa ke mana itu oleh anggota PPS?

171. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Wak ... jadi, anggota PPS-nya mengatakan kepada rapat pleno pada saat itu mereka mendatangi, mereka dihadap oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon, sehingga mereka tidak bisa membawa hasil itu ke distrik. Sehingga mereka memilih untuk berjalan kaki dari kampung, lalu mengantar langsung ke KPU, Majelis. Setelah mereka sampai (...)

172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diantar ke KPU-nya? Kp ... he eh, langsung kabupaten?

173. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Langsung ke kabupaten, Majelis.

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

175. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Sampai di kabupaten, lalu mereka melapor kepada ... informasi ini didapatkan (...)

176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu berapa hari itu prosesnya pada waktu itu?

177. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Prosesnya hampir 1 hari lebih, Majelis, berjalan.

178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, 1 hari dia bawa membawa dari ... PPS membawa itu (...)

179. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ke.

180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ke TPS (...)

181. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian menuju ke kabupaten itu ke KPU itu 1 hari?

183. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya. Ya, ya? 1 hari, Majelis.

184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

185. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

1 hari Majelis.

186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

1 hari?

187. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

1 hari, 1 malam, Majelis.

188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Siapa yang membawa itu?

189. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Yang membawa PPS, Majelis.

190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

PPS-nya berapa orang?

191. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

PPS-nya 2 orang, Majelis.

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

2 orang?

193. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

2 orang membawa kotak itu?

195. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, membawa kotak itu ke kabupaten, Majelis.

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Membawa kotak itu ke kabupaten?

197. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk 4 TPS?

199. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Untuk 4 TPS. Lalu (...)

200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk 4 TPS itu berapa kotak itu berarti, 4 kotak?

201. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

4 TPS itu berapa kotak? 4 kotak, Majelis.

202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

4 kotak itu dibawa 2 orang itu?

203. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya. Yang dibawa C hasilnya, Majelis.

204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, C hasilnya?

205. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kan ada 6 kotak itu barangnya? Coba-coba, KPU jelaskan!

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Langsung saja, langsung!

208. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN

Baik, Yang Mulia. Untuk 4 C.Hasil-KWK yang dibawa oleh teman-teman PPS itu ada 4, tapi mereka tarik dari kotak setelah pemungutan suara, kemudian rekapitulasi di tanggal 5 itu.

209. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi mereka tarik dari kotak itu?

210. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN

Ya.

211. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diambil dari kotaknya untuk C.Hasilnya itu?

212. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN

Ya, betul. Benar, Yang Mulia.

213. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu yang mereka bawa oleh 2 PPS tadi ke Termohon?

214. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN

Ya, ke Termohon. Yang menurut mereka dalam rapat pleno itu mereka jelaskan bahwa di Welarek itu terjadi pemalangan lapangan terbang oleh Pemohon dan massa pendukungnya, kemudian mereka lebih memilih keluar jalan kaki untuk membawa C.Hasil itu ke Termohon di kabupaten.

215. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu buktinya apa, Pak, yang menunjukkan dari Termohon di sini? Di sini kan di halaman 26 tidak ada buktinya itu, ya?

216. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Itu ada berita acara, Majelis. Penyerahan kotak (...)

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dihidupkan, dihidupkan.

218. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ada berita acara penyerahan C-4, C Hologram dari PPS ke Termohon dan disaksikan oleh Polda Papua, disaksikan oleh Dandim Wamena, disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo, disaksikan oleh ketua, anggota saksi pasangan Pemohon, saksi dari pasangan calon, dan saksi dari Pihak Terkait. Berita acaranya ada pada poin bukti kami, 7A dan juga kami lampirkan SK (...)

219. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di 7A, ya?

220. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya. SK PPS yang mengantar kotak itu, Majelis.

221. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi sampai ke Termohon, kemudian ada para pihak di situ (...)

222. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya.

223. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang menyaksikan itu?

224. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya. Karena pada saat itu memang pada saat rapat masih rapat pleno, Majelis.

225. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi sedang saat rapat pleno itu di bawahnya?

226. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya. Sudah masuk pleno di hari kedua, Majelis.

227. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu dari 16, 4 TPS itu yang bersoal seperti itu?

228. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, Majelis.

229. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang lainnya, bagaimana dari 16 TPS itu?

230. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya? Yang lainnya ada di dalam kotak (...)

231. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada dalam kotak?

232. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya. Yang diantar dari Distrik Walerek ke kabupaten.

233. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi yang dari 13 kampung ... 13 kampung untuk 16 TPS tadi (...)

234. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

He eh.

235. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang 4 yang bersoal tadi, ya, yang dibawa oleh PPS, kemudian sisanya yang 12 TPS itu tetap seperti biasa?

236. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Ya, seperti biasa.

237. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berjalan seperti ... apa .. normalnya reguler seperti itu?

238. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Normalnya. Ada di dalam (...)

239. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada dalam kotak?

240. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

C.Hasilnya ada di dalam kotak, Majelis. Telah dibuka oleh teman-teman Termohon berdasarkan rekomendasi itu, ditemukan bahwa hanya kekurangan 4 C.Hasil dari semua 76 TPS di Distrik Welarek, Majelis.

241. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Yang Mulia Pak Suhartoyo, cukup ya? Cukup. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Termohon atau cukup?

243. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Cukup, Majelis.

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Cukup, ya. Baik, sekarang dari Pihak Terkait sama, ya, yang sistematis begitu, sambil nanti saya ... apa ... tuntun, saya pandu, supaya bisa efektif.

Yang pertama yang disampaikan adalah apa ada eksepsi atau enggak? Langsung saja.

245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan eksepsi maupun pokok perkara (...)

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Terlebih dahulu, kami menguraikan di halaman 2 mengenai kronologis atas peristiwa selama pelaksanaan PSU, sebagaimana di halaman 2 sampai dengan halaman 5 yang pada prinsipnya, kami menguraikan fakta yang terjadi selama proses PSU sampai dengan rekap, yang sangat bertolakbelakang dengan dalil disampaikan oleh Pemohon, Yang Mulia.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Secara ringkas saja, jangan dibacakan seluruhnya.

249. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Kami mohon anggap dibacakan sampai dengan halaman 5.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

251. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Saya lanjut ke bagian Eksepsi, Yang Mulia.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

253. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Sama dengan Termohon mengenai eksepsi legal standing, Yang Mulia.

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

255. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Bahwa perolehan ... bahwa DPT di Kabupaten Yalimo adalah sebesar=106.000 jiwa.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu Saudara melakukan renvoi anu, ya, kecil, ya?

257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Betul, Yang Mulia.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mengenai anunya, ya, angka-angkanya, ya?

259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Betul, Yang Mulia.

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi itu tertulis di halaman 6, di situ kan mestinya 2% bukan 1%?

261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Betul dan di halaman 2, Yang Mulia.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu baik. Terus silakan. Jadi, dalam eksepsi ini Saudara mempersoalkan bahwa Pemohon tidak memenuhi Pasal 158?

263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Betul, Yang Mulia.

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena persentasenya sama dengan apa yang disampaikan oleh Termohon tadi?

265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Betul, Yang Mulia. Melebihi 2%.

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Malah melebihi 2%. Baik, terus?

267. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Kemudian mengenai obscur libel, Yang Mulia.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Bahwa adanya 2 Petitem yang disampaikan oleh Pemohon yang sama sekali tidak menggunakan permohonan alternatif seperti frasa *dan/atau*, tapi Pemohon langsung meminta kepada MK untuk memperbaiki perolehan hasil yang benar menurut Pemohon dan meminta kepada Majelis juga untuk mendiskualifikasi (...)

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk mendiskualifikasi itu?

271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Betul, Yang Mulia.

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Jadi kami anggap bahwa (...)

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu obscur, ya?

275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Permohonan tersebut obscur, Yang Mulia.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terus? Sekarang dalam Pokok Perkara.

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Kemudian lanjut Pokok Perkara di halaman 7, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan mengenai dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai syarat pencalonan bahwa ... apa namanya ... tanggal 17 September adalah kejadian pada saat kejadian tabrakan, Yang Mulia.

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

279. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Kemudian putusan pidananya adalah tanggal 18 Februari, kemudian tuntutananya 6 bulan, Yang Mulia. Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Pemohon yang menyebutkan, "12 tahun," 12 tahun adalah dakwaannya, Yang Mulia, dan putusannya sendiri adalah 4 bulan. Itu untuk (...)

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu buktinya dari Saudara? Ada buktinya?

281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Kami baru mendapatkan putusannya itu pagi ini, Yang Mulia. Jika diperkenankan, nanti kami akan susulakn.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, segera! Kalau bisa sebelum persidangan ini selesai sudah bisa disusulkan.

283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Baik, Yang Mulia.

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terus?

285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Itu terkait dengan Pokok Perkara yang bagian pertama, Yang Mulia.

Kemudian lanjut ke halaman 8 yang persoalan kedua terkait dengan ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi, padahal ketentuan tersebut keberlakuannya hanya ditujukan sebagai persyaratan untuk menjadi calon sebelum dan pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon (...)

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu Pasal 7 ayat (2) huruf g itu, ya?

289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Betul, Yang Mulia.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Jadi, pencalonan itu sudah selesai dilaksanakan, Yang Mulia, dan pasangan calon juga telah ditetapkan. Dengan demikian, seharusnya jika mengacu kepada ketentuan pasal tersebut, seharusnya dilakukan pada saat tahap pencalonan, bukan pada saat berperkara di MK untuk mempersoalkan tentang persyaratan calon tersebut, Yang Mulia.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Kemudian mengenai adanya pemaksaan terhadap penggunaan Pasal 7 ayat (2) tersebut sebagai upaya untuk menganulir keberlakuan SK KPU Nomor 44 merupakan suatu kekeliruan, dan salah alamat, juga melanggar asas hukum yang menyatakan bahwa hukum tidak berlaku surut.

Kemudian yang ketiga, Yang Mulia, terkait dengan dalil Pemohon yang mengutip dan merujuk pada putusan-putusan MK. Perlu dipahami bahwa putusan MK adalah sebagai penafsir terhadap penggunaan terhadap persyaratan calon yang belum ditetapkan sebagai pasangan calon, artinya tidak berlaku bagi pasangan calon yang sudah ditetapkan, Yang Mulia.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Jika diterapkan pada kondisi pasangan calon yang telah ditetapkan tidak relevan lagi karena semestinya rujukan atas putusan-putusan MK tersebut penafsiran persyaratan calon digunakan pada saat Pemohon mempersoalkan penetapan calon yang seharusnya diajukan ke Bawaslu kabupaten, kemudian pengadilan tinggi tata usaha negara, dan terakhir ke Mahkamah Agung

Kemudian Pokok Perkara yang di halaman 10 bagian b-nya, Yang Mulia, mengenai tanggapan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan keberatan terhadap Keputusan Rekapitulasi Nomor 117. Perlu kami sampaikan bahwa selama dalam proses pelaksanaan pemungutan suara ulang di dua distrik, yaitu Distrik Welarek dan Apalapsili sekaligus kondisi geografis di Kabupaten Yalimo sangat sulit dan domisili penduduk yang terpencar-pencar, KPU Yalimo dapat melaksanakan pemungutan suara ulang dengan sistem one man one vote.

Secara umum, pelaksanaan pemungutan suara ulang di 2 distrik berjalan lancar pada saat pelaksanaan dan pascapelaksanaan tidak terjadi persoalan yang signifikan berkaitan dengan keamanan. Masyarakat pun menerima hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU, kecuali Pemohon dan tim suksesnya di Distrik Werarek.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau sama seperti yang ... anu ... Termohon, untuk yang Apalapsili tidak ada masalah, ya?

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Tidak ada masalah untuk Apalapsili, Yang Mulia.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada masalah. Oke.

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Kemudian dalam proses pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten yang dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Mei berdasarkan pada rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat distrik, perolehannya sudah kami sampaikan di dalam diagram. Perolehan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 4.236, sementara untuk Paslon Nomor 2=17.464. Kemudian di Apalapsili sama, 6.782 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan untuk Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 645. Uraianya sudah saya sampaikan di dalam diagram (...)

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan uraiannya.

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Mohon dianggap dibacakan.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya minta konfirmasi. Jadi, angka-angka ini sama dengan angka-angka yang disampaikan Termohon atau beda Anda?

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Betul, Yang Mulia.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama?

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Sama.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, sekarang dalam Petitem, silakan!

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Mohon maaf, belum ke ... sampai ke Petitem, Yang Mulia.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih apa ini?

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Kami masih ke halaman 14 di bagian ketiga mengenai tanggapan Pihak Terkait mengenai pelaksanaan rekapitulasi di Distrik Welarek, Yang Mulia.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Penghitungan ulang dan perubahan hasil perolehan suara dilakukan karena adanya keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 1, yaitu Pemohon dan adanya rekomendasi dari Bawaslu.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu itu, kan?

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Betul.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, apa yang disampaikan oleh Termohon, benar itu?

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Betul, Yang Mulia.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, dianggap ... punya Anda juga dianggap dibacakan, ya? Sama, ya?

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Sama, Yang Mulia.

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Kemudian, yang bagian b-nya, Yang Mulia. Kekeliruan ... keliru jika Pemohon mendalilkan mengusir PPD dan saksi Paslon Nomor 02. Justru yang terjadi adalah PPD tidak mau melaksanakan rekomendasi Bawaslu, kemudian diambil alih oleh KPU, tetapi tetap juga mengganggu jalannya rapat pleno rekapitulasi, Yang Mulia. Akhirnya dengan terpaksa ... apa ... mengeluarkan, Yang Mulia.

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, itu anu, ya, faktanya menurut Anda begitu, ya?

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Betul, Yang Mulia.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu di halaman 14 sampai ke-15 itu?

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Ya, Yang Mulia.

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Kemudian, untuk di halaman 15, bagian c-nya, tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menyatakan KPU mengusir anggota PPD, PPD distrik ... dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama seperti yang tadi saya sampaikan, Yang Mulia.

Terakhir ke petitum, Yang Mulia.

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini angka-angka di halaman 14 dianggap dibacakan?

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Oh, sama sebelum Petitum ... betul, Yang Mulia. Ini yang di ... kami sandingkan antara perolehan hasil menurut Pemohon dan hasil menurut Pihak Terkait, Yang Mulia.

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait, ya.

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Ini ada beberapa bukti yang kami ajukan. Ada sedikit berbeda dengan yang diajukan oleh Pemohon, dimana Pemohon menyampaikan adanya di Kampung Hindalimuhuk sebenarnya ada TPS 1 dan TPS 2, di dalam dalil hanya menyebutkan Hindalimuhuk. Jika diakumulasi pun tidak sesuai perolehan suaranya. Jadi, kami tetap mencantumkan (...)

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti PT-24 itu?

331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Betul, Yang Mulia.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Begitu juga sama dengan di angka 4-nya di Tahamak, Yang Mulia, ada 2 TPS.

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tahamak? TPS 2?

335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Betul. Kami buktikan di PT-29.

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT

PT-29. Oke.

337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Baik. Terima kasih. Untuk terakhir, petitem, Yang Mulia.

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar!

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Baik.

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk di Kampung Hindalimuhuk itu ada 2 TPS, ya?

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Ada 2 TPS, Yang Mulia.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang kemarin di dalil hanya disebutkan 1 TPS?

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Sebenarnya tidak disebutkan 1 TPS, hanya menyebutkan Hindalimuhuk, kami tidak tahu apakah itu TPS 1 atau TPS 2 atau keseluruhan.

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Begitu juga dengan di TPS di Tahamak?

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Tahamak. Betul, Yang Mulia.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Baik.

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Karena diakumulasi pun tidak cocok angkanya.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Terima kasih. Terus sekarang petitum?

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Untuk petitum, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait.

Dua, menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima.

Kemudian, dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Nomor 117, dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 dan seterusnya tanggal 11 Mei 2021.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami, Pihak Terkait.

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Yang Mulia, Pak Suhartoyo, silakan! Cukup? Cukup.

Prof Enny, silakan!

351. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pihak Terkait, ini yang di halaman 7 ini bukti ada upaya ... ada kegiatan damai tadi, penyelesaian secara damai, ya, pada waktu terjadi kecelakaan itu, ini dibuktikan dengan apa ini?

352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Kami bisa buktikan dengan putusan sebenarnya, Yang Mulia, karena di dalam lampiran ini ada mengenai foto perdamaian, ada Berita Acara, ada surat pernyataan.

353. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari keluarga yang bersangkutan itu?

354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Betul. Dan termasuk (...)

355. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu di PT berapa itu?

356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Kami belum ajukan sebagai bukti, Yang Mulia, tapi kami baru dapat pagi ini.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau mau ditambahkan sebagai bukti, segera saja dimasukkan!

358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Baik. Baik, Yang Mulia.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, kalau itu dianggap perlu dan meyakinkan supaya meyakinkan Mahkamah, silakan ditambahkan menjadi bukti. Ya, nanti akan disahkan sebelum sidang ini selesai.

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, mau diajukan atau enggak? Kalau mau diajukan supaya bisa diserahkan ke Mahkamah.

362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Sebenarnya ini bukti yang sangat penting, Yang Mulia, karena terkait dengan yang dalil Pemohon yang 12 tahun sebenarnya cuma ... itu sebagai dakwaan, tapi tuntutan cuma 6 bulan dan vonisnya 4 bulan. Begitu juga (...)

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu perlu sekali untuk kita cermati. Gimana?

364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Tapi tadi disampaikan Termohon sebenarnya juga sudah mengajukan bukti, Yang Mulia, mengenai putusan.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama? Sebetulnya sama itu?

366. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Samanya kami tidak tahu, tapi tadi disampaikan ada juga (...)

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terserah Anda, kalau Anda mau mengajukan juga silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Terserah, ya.

368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Cukup, Prof? Cukup? Baik kalau begitu. Terima kasih, Pihak Terkait.

Yang terakhir sekarang Bawaslu. Silakan pokok-pokoknya saja, yang tidak dibacakan dianggap sudah dibacakan, ya. Silakan!

370. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, kami sampaikan beberapa hal sebelum kami bacakan.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

372. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Yang pertama, kami hadir di sini, Bawaslu Provinsi Papua telah mengambil alih tugas Bawaslu Kabupaten Yalimo, Yang Mulia.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

374. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya. Kemudian, kami akan menyampaikan keterangan hasil supervisi, tapi kami juga lampirkan juga keterangan dari Bawaslu Yalimo. Nah, alasan pengambilalihan ini, Yang Mulia, setelah ... apa namanya ... pasca putusan MK, ada beberapa hal yang menjadi temuan kinerja Bawaslu Kabupaten Yalimo, sehingga saat ini sedang diklarifikasi. Kemudian juga yang pokoknya sebenarnya adalah adanya keterangan-keterangan berbeda, Yang Mulia.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

376. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya, sehingga kami ambil alih sesuai dengan Per Bawaslu Nomor 22 Tahun 2018. Jika nanti Majelis memperkenankan, kami membacakan hasil supervisi, kemudian juga keterangan dari Bawaslu Kabupaten

Yalimo. Nanti mengenai penilaiannya, kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tidak usah dibacakan seluruhnya, tapi poin-poin penting yang harus dibacakan. Silakan.

378. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Baik, Yang Mulia, terima kasih.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, karena kita sudah menerima keterangan tertulis ini dan ini sudah dibagikan seluruhnya kepada Para Pihak.

380. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Mohon izin, Yang Mulia. Kami akan bacakan dulu dari hasil supervisi.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

382. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (...)

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan itu.

384. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Provinsi Papua dan seterusnya.

Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hasil supervisi sebagai berikut, yang pertama Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan bimtek kepada ketua dan anggota PPD Distrik Apalapsili dan Distrik Welarek pada tanggal 27 April 2021, pukul 13.00 WIT dan seterusnya, ya.

Kemudian bahwa Anggota Bawaslu RI, Bapak Fritz Edward Siregar bersama Bapak Rahmat Bagja, didampingi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

Kabupaten Yalimo melaksanakan supervisi yang dibagi 2 tim ke tim pertama ke Distrik Welarek (...)

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu intinya tidak usah dibacakan seluruhnya.

386. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Baik, Yang Mulia.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Intinya sudah dilakukan supervisi, ya?

388. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hasil supervisi yang penting apa?

390. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Di Apalapsili, Yang Mulia.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

392. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Di Apalapsili berdasarkan hasil supervisi tim bahwa waktu pelaksanaan pemilihan bervariasi ada yang belum mulai pemilihan, ya, kalau dalam PKPU diatur pukul 07.00, ya, yang jadi temuan pada saat itu ada yang dilaksanakan pukul 10.30 WIT, kemudian pukul 10.45 WIT.

Kemudian juga kami temukan, ya, tim temukan pada saat supervisi, ada pemilih yang tidak dapat hadir, ya, ini merupakan pengawas TPS, nah ternyata pada saat itu diwakilkan, Yang Mulia, dalam menyampaikan hak pilihnya.

Kemudian bahwa ... Poin 5, Yang Mulia. Untuk Distrik Welarek, pada intinya tim, ya, di Welarek ini, Yang Mulia, hanya dapat dilalui dengan pesawat udara. Tadi kalau KPU menyatakan ... Termohon

menyatakan 1 hari 1 malam, tapi menurut penjelasan Bawaslu 2 hari sebenarnya, 2 hari jalan kaki dari Distrik Welarek ke Ibu Kota ... ya.

Kemudian pada waktu tim turun, tidak ada ... apa namanya ... aktivitas pemilihan belum berjalan, ya, jadi kami tiba pukul 08.55 WIT kemudian di bandara itu hanya ada 2 kampung yang dekat sehingga kami yang bisa tempuh hanya 4 TPS, Yang Mulia, dan dari 4 TPS itu juga belum memulai pemilihan. Ya, kami juga di sana ada Komisioner KPU Provinsi Papua, Bapak Adam Arisoi. Kami juga tim sampaikan supaya segera mulai pemilihan.

Kemudian angka 6. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Yalimo dimulai pada tanggal 10-11 Mei, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Yalimo. Hasil supervisi bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo (ucapan tidak terdengar jelas) Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo, Bawaslu Provinsi Papua, dan saksi masing-masing paslon 01 dan 02.

Kemudian bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPSU tingkat Kabupaten Distrik Apalapsili dimulai pukul 09.30 WIT oleh PPD Distrik Apalapsili. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tingkat Kabupaten Distrik Apalapsili sempat diskors pukul 12.00 WIT, kemudian diajukan dengan menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik Apalapsili pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 14.30 WIT untuk masing-masing pasangan calon.

Bahwa setelah PPD Apalapsili menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, masing-masing saksi pasangan calon menerima dan tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil yang telah disampaikan oleh (...)

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini untuk Distrik Apalapsili, ya?

394. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Apalapsili, Yang Mulia.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus.

396. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kemudian bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dilanjutkan pada hari selasa, tanggal 11 Mei, pukul 18.31 WIT dengan dimulai penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang

Distrik Welarek oleh PPD Distrik Welarek. Bahwa pada saat pembukaan kotak suara tidak ditemukan rekapan D Hasil Tingkat Distrik Welarek karena tercecer di kotak suara lain, sehingga PPD Distrik Welarek mengalami kendala dalam pembacaan, maka KPU Kabupaten Yalimo meminta saran dari Bawaslu Kabupaten Yalimo untuk membuka kotak suara lain, supaya memastikan keberadaan D Hasil Kecamatan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menanggapi permintaan KPU Kabupaten Yalimo dengan memberikan rekomendasi untuk membuka kotak suara dan mengecek Formulir D Hasil Kecamatan yang tercecer.

Bahwa PPD Distrik Welarek melanjutkan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Formulir D Hasil Kecamatan, tetapi Saksi Pasangan Calon Urut 1 mengajukan keberatan terhadap perolehan suara yang disampaikan oleh PPD Distrik Welarek karena menurut mereka tidak sesuai dengan C Hasil tingkat TPS.

Bahwa atas keberatan tersebut, PPD Welarek tidak mampu menjelaskan dan menjawab keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga KPU Kabupaten Yalimo meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Yalimo berupa rekomendasi rekapitulasi dan perbaikan terhadap penyelesaian keberatan tersebut berdasarkan C Hasil tingkat TPS.

Bahwa KPU Kabupaten Yalimo berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo memberhentikan PPD Distrik Welarek dan mengambil alih tugas PPD Welarek untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang tingkat Distrik Welarek berdasarkan C Hasil tingkat TPS untuk 61 kampung, 76 TPS.

Bahwa dari hasil rekapitulasi hasil ulang tersebut terdapat pengalihan perolehan suara oleh PPD Welarek, dimana PPD Welarek menyampaikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 1.068 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar ... sebanyak, kami ulangi, sebanyak 20.742. Tetapi setelah dilakukan perbaikan dan pembetulan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 4.236 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 17.464 suara.

Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, PPD Disrtrik Apalapsili dan KPU kabupaten selaku PPD Welarek telah menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

398. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya. Demikian (...)

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terakhir itu sudah bisa diselesaikan, ya, untuk rekapitulasi di tingkat kabupaten?

400. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Sudah, Yang Mulia. Sudah dengan keluarnya (...)

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk dua distrik itu, ya?

402. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kalau Apalapsili kan tidak ada keberatan, Yang Mulia.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau Distrik Apalapsili tidak ada masalah (...)

404. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Tidak ada masalah.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi Distrik Welarek yang ada masalah, tapi kemudian dapat diselesaikan?

406. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perolehan suara yang akhir ini 01=4.236 dan 02=17.464 itu?

408. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya, sesuai hasil pengawasan, Yang Mulia.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Terus apalagi yang akan disampaikan?

410. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Mohon izin, Yang Mulia.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

412. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Apakah kami perlu bacakan yang keterangan tertulis dari Bawaslu Yalimo?

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak usah dibacakan (...)

414. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kami lampirkan saja, Yang Mulia.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi yang penting saja apa? Nanti kita cermati pada waktu kita akan membahas perkara ini. Silakan yang penting saja.

416. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Baik. Yang Mulia, terkait dengan keterangan Bawaslu tentunya ... apa namanya ... menjawab dalil yang disampaikan oleh (...)

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eenggak usah menjawab dalil.

418. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Keterangan.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hanya, anu saja ... apa yang menurut (...)

420. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya tanya saja (...)

422. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Baik.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya pandu. Menurut Bawaslu dalam pengawasannya, ada persoalan penting yang terjadi pada waktu dilakukan PSU di Apalapsili dan di Welarek? Apakah itu hanya yang berupa tadi, persoalan yang terjadi ada dua penghitungan suara yang kemudian diambil alih di ... tidak jadi di PPD, tapi kemudian langsung diambil oper ke tingkat kabupaten? Di KPU? Silakan!

424. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya. Baik, Yang Mulia. Pada intinya ... apa namanya ... keterangan yang berbeda itu, terutama hasil pengawasan di Distrik Welarek, kalau Apalapsili klir, Yang Mulia.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

426. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya. Pengawas ... karena tidak ada keberatan di tingkat ... untuk Apalapsili, di tingkat kabupaten.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

428. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Nah, hasil pengawasan dari Bawaslu ... hasil pengawasan dari Distrik Welarek ini yang berbeda, Yang Mulia.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

430. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Baik itu Bawas kabupaten, maupun dari PPD ... apa, pandisnya, Yang Mulia.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

432. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Kami juga sudah lampirkan dalam bukti terkait dengan adanya dua rekomendasi oleh Pandis Welarek.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ada lagi yang akan disampaikan?

434. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Terkait dengan ... apa namanya ... apa namanya ... diskualifikasi calon.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

436. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

438. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bawaslu Kabupaten Nabire ... Yalimo menerima laporan pelanggaran dan sudah ditindaklanjuti dan untuk rekomendasinya bahwa bukan kewenangan Bawaslu.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya.

440. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap. Intinya itu, Yang Mulia.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Cukup, ya?

442. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya, cukup, Yang Mulia.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu ada dari Pak Suhartoyo? Silakan!

444. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Izin dari KPU, siapa yang hadir, ya? KPU RI.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KPU RI ada yang mensupervisi dalam persidangan ini? Biasanya Pak Hasyim atau siapa hadir?

446. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Hasyim, KPU yang hadir.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Pak Hasyim.

448. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, baik. Ini ada, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, ingin menanyakan kepada KPU Pusat. Saya persilakan, Yang Mulia!

449. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih.

Pak Hasyim, begini, PKPU yang Nomor 1 Tahun 2020 yang menggantikan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang tadi disampaikan oleh Termohon, Pasal 90 ayat (1) tentang yang ... pasal yang mengatur terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Singkatnya menjadi terpidana, dapat dikenakan sanksi pembatalan sepanjang itu dilakukan sebelum hari pemungutan suara, betul ya, Pak Hasyim, ya?

450. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Benar demikian, Yang Mulia.

451. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Yang ingin saya tanyakan adalah pengaturan terhadap calon yang kemudian menjadi terpidana setelah pemungutan suara diatur di mana di PKPU, Bapak?

452. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin merunut dari ketentuan di undang-undang terlebih dahulu. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor Tahun 10 Tahun 2016, itu Pasal 164 ayat ... Pasal 164 ayat ... mulai dari ayat (6), ayat (7), ayat (8) terutama ayat (8). Kami bacakan saja, "Dalam hal bupati/wakil ... dalam hal bupati/wali kota dan/atau calon wakil bupati/wakil wali kota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota, kemudian pada saat itu juga diberhentikan sebagai bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota."

Jadi, berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Nomor Tahun 10 Tahun 2016 sepanjang yang kami ketahui tidak ada ketentuan tentang pembatalan pasangan calon atau pembatalan calon karena statusnya sebagai terpidana. Jadi yang kami temukan di undang-undang itu demikian sebagaimana yang saya bacakan.

453. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

454. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Nah, berdasarkan itulah kemudian di dalam pengaturan di PKPU, di PKPU Nomor 1 ... Nomor 1 Tahun 2020 yang juga belakangan kami di PKPU Nomor 9 Tahun 2020, ketentuannya tetap sama yang pada intinya pasangan calon ... di Pasal 90 ayat (1) huruf b pada intinya pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan. Jadi yang dibatalkan pasangan calon oleh KPU provinsi atau KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota apabila, b, pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling lama ... paling singkat 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum hari pemungutan suara.

Jadi, rumusan norma di dalam PKPU kami rumuskan demikian karena di dalam Undang-Undang Pilkada tidak mengatur tentang bagaimana status calon atau pasangan calon yang terkena pidana setelah peristiwa pemungutan suara. Demikian, Yang Mulia.

455. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, memang tidak ruang ... ada ruang kosong itu dipahami oleh KPU, ya? Antara setelah pemilihan sampai penetapan terpilih?

456. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya, benar, Yang Mulia. Karena ini berbeda dengan di Undang-Undang Nomor Tahun 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu peristiwa setelah pemungutan suara sampai dengan penetapan calon terpilih demikian juga setelah penetapan calon terpilih menuju pengesahan dan pelantikan itu diatur bagaimana kalau ada situasi ... apa namanya ... calon kemudian terkena pidana yang telah ... berdasarkan putusan pengadilan adalah berkekuatan hukum tetap. Jadi, bedanya di situ. Kalau di Undang-Undang Pilkada tidak ada aturan di dalam Undang-Undang Pilkada yang mengatur tentang situasi kalau ada calon yang terkena pidana yang telah berkekuatan ... berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ancamannya 5 tahun atau lebih. Sehingga tadi yang saya bacakan di Pasal 164 (...)

457. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya.

458. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Di Undang-Undang Pilkada.

459. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Paham, paham.

460. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Demikian, Majelis.

461. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Paham. Artinya, bisa dipahami bahwa sesungguhnya KPU itu bisa menariknya bukan dari hasil pemungutan ... hari pemungutan suara, Pak Hasyim, sebenarnya? Tarikannya sebenarnya sejak belum ditetapkan pasangan terpilih? Kenapa dibiarkan ada ruang kosong begini?

462. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Karena di Undang-Undang Pilkada ... di Undang-Undang Pilkada bahkan sampai pelantikan pun (...)

463. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak. Paham (...)

464. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Status (...)

465. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Paham, Pak (...)

466. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya (...)

467. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Paham, Pak? Artinya bahwa kan ... itu kan tarikannya sejak pasangan ditetapkan sebagai pasangan terpilih, pasangan terpilih kemudian tetap bisa dilantik, meskipun menjadi terpidana, baru setelah

itu nanti diberhentikan. Kenapa pengaturan dari KPU sendiri tidak menariknya dari sebelum ditetapkan sebagai pasangan terpilih? Hanya dari titik pemungutan suara, Pak Hasyim? Ini ada ruang kosong ini sengaja dibiarkan atau memang ini ada pengaturan khusus yang ingin saya tanyakan, sehingga bisa me-cover persoalan hari ini, Pak Hasyim.

468. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, KPU tentu tidak ... tidak bisa atau tidak punya wewenang untuk mengatur atau memberikan sanksi berupa pembatalan calon, yang itu tidak diatur di dalam undang-undang. Jadi di undang-undang ketentuan tentang pembatalan pasangan calon, itu berkaitan dengan hal-hal tertentu saja. Misalkan dengan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3). Kemudian dengan money politics yang TSM.

Jadi kalau ... kalau di luar yang itu, itu tidak ada ketentuan yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan calon. Demikian, Yang Mulia.

469. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang ... oh, paham. Kalau yang kemudian titiknya sampai pada pemungutan suara ditarik dari ketentuan pasal berapa, Pak, 10/2016-nya?

470. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Harus saya cari dulu, Majelis.

471. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu kan ada konsideransnya ketika membuat PKPU yang terakhir 7/2020, kemudian memberikan batasan sampai pemungutan suara ditariknya dari pasal berapa di Undang-Undang Pilkadaanya? Bisa dilihat di pertimbangan atau konsiderans pertimbangan ketika mengeluarkan PKPU itu?

472. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi selain Peraturan KPU tentang ... apa namanya ... pencalonan, itu KPU juga mengatur Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sampai dengan penetapan ... apa namanya ... calon terpilih. Di dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, dan seterusnya, di Pasal 64 ... apa namanya ... KPU mengatur bahwa ayat (1), kami bacakan saja.

"Dalam hal sejak penetapan calon terpilih sampai dengan pengusungan pelantikan, salah satu calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan pasangan calon, meskipun tidak berpasangan."

Ayat (2), "Dalam hal sejak penetapan pasangan calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap pasangan calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan pasangan calon."

473. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

474. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Nah, untuk yang PKPU ini ... apa namanya (...)

475. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada tidak di situ untuk yang terpidana, Pak?

476. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terdana tadi sudah saya bacakan, Yang Mulia. Pasal ... pasal ... Peraturan KPU.

477. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, yang belakangan tadi, kan? Coba diulang, Pak, mohon, Pak, diulang yang kedua, Pak.

478. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya, saya ulangi, Yang Mulia.

479. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

480. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota (...)

481. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

482. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Pasal 64 ayat (2), "Dalam hal sejak penetapan pasangan calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Provinsi, KIP Aceh, atau KPU Kabupaten/Kota mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap pasangan calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan pasangan calon."

Nah, ketentuan ini ... apa namanya ... berkesinambungan dengan Peraturan KPU tentang Pencalonan. Mengapa? Karena rujukan kami di Undang-Undang Pilkada itu ketentuannya ... apa namanya ... soal pelantikan itu walaupun statusnya terdakwa tetap dilantik. Kalau sebelum itu di ... inggih. Sebelum itu, di undang-undang tidak mengatur.

483. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, paham, Pak. Artinya, itu pertanyaan kami adalah kenapa Bapak katakan berkesinambungan padahal ada yang jeglong, ada yang kosong kan itu? Ya, kan, Pak Hasyim?

484. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Karena di undang-undang ... karena di undang-undang tidak mengatur, Pak.

485. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, betul, betul.

486. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Demikian.

487. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu yang kami ingin ... apa ... tracing bahwa untuk menjawab ... salah satu pertimbangan untuk menjawab persoalan hari ini. Karena memang kalau yang dibacakan Bapak berkaitan dengan PKPU Tahun 2018 Nomor 9 tadi, itu adalah ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan terpilih. Sementara PKPU yang 9/2020 me-cover sampai pada titik ruang pemungutan suara. Jadi memang ada ruang kosong sebagaimana yang hari ini muncul di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Yalimo ini.

Oke, kalau begitu, nanti kami akan ... harus bekerja keras dari yang ... apa ... rujukan yang lain dan pertimbangan hukum yang ... apa ... yang cermat.

Itu saja dulu, Prof. Arief Pak Ketua.

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Suhartoyo.
Terima kasih, Pak Hasyim. Masih ada lagi?

489. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia.

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih ada lagi, Pak Hasyim, yang mau dijelaskan atau sudah cukup?

491. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Saya kira sudah cukup. Intinya, kami sampaikan bahwa perbandingannya Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pilkada, peristiwa setelah pemungutan suara ... apa namanya ... ada di situ tadi. Kalau di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 status tentang calon, itu setelah pemungutan suara, sampai dengan ... apa namanya ... penetapan hasil suara, sampai dengan calon terpilih, sampai dengan pelantikan, itu dalam hal terdapat status hukum baru misalkan, sebagai terpidana itu diatur. Tetapi kalau di dalam Undang-Undang Pilkada, hal itu tidak diatur. Diaturinya di Undang-Undang Pilkada hanya pada level ketika sudah terpilih misalkan, itu kemudian ada status sebagai terpidana, itu yang diatur di Undang-Undang Pilkada.

Demikian, Yang Mulia.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi, Prof. Enny? Silakan!

493. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, saya menanyakan ke Pak Hasyim. Itu kemarin di KPU ada ini, ya, pembukaan kotak suara tanggal 2 Juni, betul?

494. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya, benar, Yang Mulia, di kantor KPU.

495. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu berapa kotak suara ... kotak suara yang ini ... yang tadi? Yang 4 atau yang 13?

496. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya, yang dibawa kotaknya ada 2, itu mewakili 2 kecamatan tadi, Welarek dan Apalapsili.

497. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, 2 kotak suara itu mewakili untuk ... termasuk Welarek di dalamnya, ya?

498. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya, betul, Yang Mulia. Jadi karena (...)

499. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang dibuka apa saja itu, Pak? Dokumen apa yang dibuka, Pak?

500. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
Jadi (...)

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu pembukaannya (...)

502. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Jadi (...)

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pembukaannya untuk kepentingan apa, Pak Hasyim? Untuk kepentingan pembuktian di sidang Mahkamah, kan?

504. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, pada sidang terdahulu, kami menyampaikan kepada Majelis tentang persoalan ini. Karena waktu itu, kan ... apa namanya ... alat bukti berupa dokumen-dokumen C Hasil di semua TPS yang diperintahkan untuk ke PSU itu barangnya masih ada di dalam kotak.

Nah sementara, situasinya 5 orang anggota KPU Yalimo ... Yalimo posisi sudah ada di Jakarta, kemudian kotak suara juga dibawa ke Jakarta, dikawal oleh ... apa namanya ... aparat kepolisian dari polda maupun ... Polda Papua maupun Polres Yalimo. Dan kemudian, setelah disampaikan dalam persidangan, kemudian mendapatkan persetujuan diperintahkan oleh Mahkamah untuk membuka kotak dalam rangkanya untuk mengambil alat bukti, Yang Mulia. Dilakukan di kantor KPU, itupun dibuatkan Berita Acara, kami arahkan BErita Acaranya adalah dalam rangka pengambilan alat ... apa ... dokumen sebagai alat bukti persidangan di Mahkamah. Kemudian, di foto kopi, kemudian dimasukkan kembali ke dalam kotak, semua diberitaacarkan, dan disaksikan oleh kepolisian dan Bawaslu ... dan Bawaslu juga ikut menyaksikan. Dan menyaksikannya bukan sekadar ketika membuka kotak, sampai dengan ketika memfoto kopi, dan mengembalikan ke dalam kotak karena memang prosedurnya demikian, Yang Mulia.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

506. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Hasyim, ya. Cukup saya kira, ya?

508. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Yang Mulia.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sebelum terakhir ... kita akhiri, jadi semuanya sudah memberikan jawaban dan keterangan, maka Majelis akan mengesahkan bukti yang diajukan. Pemohon menambahkan Bukti P-104 sampai dengan P-105, betul?

510. KUASA HUKUM PEMOHON: JONATHAN WAEO SALISI

Betul, Yang Mulia.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-89, betul?

512. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS

Benar, Majelis.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-29?

514. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Betul, Yang Mulia.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, Bawaslu PK-1 sampai dengan PK-14, betul?

516. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya, betul, Majelis.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Semuanya disahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Oke. Sebelum saya akhiri, ada yang akan disampaikan? Cukup, Pemohon?

518. KUASA HUKUM PEMOHON: PITHER PONDA BARANI

Cukup, Yang Mulia.

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Termohon, cukup?

520. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN

Majelis, izin.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

522. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN

Ada 1 yang perlu kami sampaikan dari (...)

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa?

524. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN

Dari Termohon tentang Permohonan Pemohon terkait tentang KPU Yalimo mengalihkan suara, itu tidak benar. Karena setelah kami rekap berdasarkan rekomendasi Bawaslu tadi, ternyata ada perolehan suara Pihak Terkait, kemudian juga Pemohon. Jadi, yang kami rekap itu berdasarkan C Hasil di tingkat TPS.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

526. TERMOHON: YEHEMIA WALIANGGEN

Yang mana tanggal 5 itu masyarakat Yalimo sudah menyalurkan hak pilih mereka.

Terima kasih, Yang Mulia.

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Tercatat di persidangan ini.

Pihak Terkait, ada lagi? Cukup?

528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AAN SUKIRMAN

Cukup, Yang Mulia.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Bawaslu, cukup?

530. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Cukup, Yang Mulia.

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu (...)

532. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Izin, Majelis.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Pak Hasyim.

534. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Hasyim.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Hasyim!

536. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya. Sedikit saja, Majelis. Terima kasih.

Sepengetahuan kami, dalam perkara yang hampir serupa di Pesisir ... Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Seingat kami, kemarin ada ... apa namanya ... permohonan perselisihan yang pertama. Kemudian ... kemudian, ada permohonan yang kedua. Permohonan kedua, kan yang di soal hampir sama, di antaranya yaitu masalah status calon. Karena pada waktu pencalonan ... apa ... salah satu calon bupati itu terkena pidana, kemudian melakukan upaya hukum dan putusan kasasinya baru terbit diketahui itu kalau tidak sehari sebelum pelantikan (...)

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

538. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Nah, barangkali peristiwa hukum yang hampir sama itu. Demikian, Majelis, terima kasih.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Pak.

540. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Cukup, ya. Baik, kalau begitu, ini Panel Hakim akan segera melaporkan dalam RPH untuk memutuskan bagaimana kelanjutan dari perkara ini. Para Pihak diharapkan bisa menunggu panggilan sidang berikutnya, ya, bagaimana apakah sidang ini akan me ... dilanjutkan atau semua bukti-bukti yang disampaikan kepada Majelis sudah cukup untuk mengambil satu putusan akhir. Gitu, ya.

Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.52 WIB

Jakarta, 6 Juni 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

